Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Muhammad yusuf

Prodi Administrasi Publik fakultas Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email : Muhyusufffff123@gmail.com

ABSTRACT

In the Indonesian state administration, Regional Autonomy is the elaboration of territorial decentralization. Its realization is in the form of regional rights, authorities and obligations to regulate and manage their own household affairs based on aspirations in accordance with applicable laws and regulations. One of the objectives of rolling out the Regional Autonomy policy in Indonesia is Democratization, Empowerment and Public Participation. To achieve this, the government has rolled out a policy of decentralization in stages, namely that provinces are given limited autonomy, broad autonomy is given to districts/cities and villages are given original autonomy. Community participation is a process of activities carried out by individuals or individually or in the community. For the interest or connection with organizations or communities that join in the context of the goals of the community itself. This research uses descriptive qualitative research method. From the results of the study, it was found that community participation in Bulu Wattang Village was influenced by leadership, communication and education. From the results of the study, it was found that the village head had worked as a leader well, communication between the village government and the community was well established and the low level of public education that affected participation in development planning in Bulu Wattang Village, Panca Rijang District.

Keywords: Public; Participation Development Planning

ABSTRAK

Dalam ketatanegaraan Indonesia Otonomi Daerah merupakan penjabaran dari desentralisasi teritorial. Realisasinya dalam bentuk hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuan pengguliran kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia adalah Demokratisasi, Pemberdayaan dan Partisipasi publik. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah menggulirkan kebijakan desentralisasi secara bertingkat, yakni kepada provinsi diberikan otonomi terbatas, otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota dan Desa diberikan otonomi asli. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok atau masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka

terhadap organisasi atau masyarakat yang bergabung dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Bulu Wattang di pengaruhi oleh kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kepala Desa telah melaksanakan perannya sebagai pemimpin dengan baik, komunikasi pemerintah Desa dengan masyarakat terjalin dengan baik dan rendahnya pendidikan masyarakat mempengaruhi partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang.

Kata Kunci : Publik; Partisipasi ;Perencanaan Pembangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan social ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan(Ahmad Mustanir¹), Kamaruddin Sellang²), Akhwan Ali³), Madaling⁴) & 1), 2018).

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Sementara Peraturan Daerah yang mengatur mengatur tentang retribusi adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar(Mustanir, 2016).

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini sudah digunakan diberbagai bidang baik bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Teknologi internet yang kini sudah mendarah daging harus dimanfaatkan secara optimal, keberadaan teknologi diharapkan juga bisa menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan, sebuah kemajuan jika pemerintah mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik. Menurut Ely Sufianti (2006) rendahnya kualitas pelayanan terjadi hampir pada semua aspek pelayanan publik, baik pada aspek pelayanan jasa, pelayanan administrative dan pelayanan barang. Untuk mengatasi masalah permasalahan tersebut dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan elektronik. Hal tersebut juga didasari oleh kenyataan bahwa masyarakat sudah semakin terbiasa dengan jaringan tersebut. Jaringan berbasis teknologi internet yang digunakan oleh pemerintah tersebut dikenal dengan nama e-Government(Akhmad, Mustanir, & Ramadhan, 2006).

Seperti yang dikemukakan oleh Kuncoro (2004;58) sebagai berikut : Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang meliputi pendekatan top down dan Bottom up, diatas kertas nampaknya akan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas

nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, kenyataannya banyak daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi lokal, karena sebagian besar proposal yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Akibatnya, proposal akhir yang masuk ke pusat biasanya di dominasi oleh program yang diajukan oleh level pemerintahan yang lebih tinggi khususnya pemerintah provinsi dan pusat. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan di implementasikannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diharapkan semua program pembangunan daerah akan terintegrasi dengan perencanaan program pembangunan nasional (Mustanir & Yasin, 2018).

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat didalam pembangunan desanya seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, penghasilan, komunikasi dan kepemimpinannya. Pemimpin masyarakat di desa merupakan orang terdepan dalam menggerakkan, menuntun dan mempengaruhi masyarakat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengutamakan tercapainya tujuan bermasyarakat secara maksimal dengan memaksimalkan partisipasi seluruh anggota masyarakatnya. Dengan demikian gaya kepemimpinan yang baik itu adalah yang mampu mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab pada masyarakat, tanpa mengurangi partisipasi dan tanggung jawab kepada masyarakat lainnya. Pemerintahan desa harus mampu mempengaruhi masyarakatnya agar bersedia berpartisipasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Adam Latif 1, Irwan2, 2019).

Masyarakat yang telah mengetahui dan memahami jika di kelurahan mereka terdapat lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti LPM, PKK, atau BKM sangat menyayangkan lembaga tersebut karena tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan menganggap bahwa lembaga tersebut dibentuk hanya sebagai pelengkap di kelurahan mereka. Masyarakat menginginkan lembaga-lembaga tersebut dapat mengikutsertakan semua masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan di bidang tertentu sesuai dengan minat masing-masing (seperti menjahit, tata boga, tata rias, ataupun di bidang otomotif). Mereka juga menginginkan Lurah bertindak tegas terhadap bawahannya dan selalu memotivasi masyarakat untuk bergerak ke arah perubahan yang lebih baik demi peningkatan ekonomi dan taraf kehidupan yang lebih baik (Ahmad Mustanir 1) & Samad 2), Abdul Jabbar 3), Monalisa Ibrahim 4), 2019).

Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Sementara dalam pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah abupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Di dalam penjelasan pasal 72 ayat (2), besaran anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yg bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah

penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Keberhasilan pembangunan di daerah merupakan rangkaian keberhasilan dari tingkat desa hingga kabupaten. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara baik karena menjadi bagian dari pertanggungjawaban bupati. Masyarakat dan lembaga desa juga dituntut meningkatkan perannya dalam proses perencanaan, serta pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggungjawab (D. Ahmad Mustanir, 2016).

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini sudah digunakan diberbagai bidang baik bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Teknologi internet yang kini sudah mendarah daging harus dimanfaatkan secara optimal, keberadaan teknologi diharapkan juga bisa menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan, sebuah kemajuan jika pemerintah mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik. Menurut Ely Sufianti (2006) rendahnya kualitas pelayanan terjadi hampir pada semua aspek pelayanan publik, baik pada aspek pelayanan jasa, pelayanan administrative dan pelayanan barang. Untuk mengatasi masalah permasalahan tersebut dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan elektronik. Hal tersebut juga didasari oleh kenyataan bahwa masyarakat sudah semakin terbiasa dengan jaringan tersebut. Jaringan berbasis teknologi internet yang digunakan oleh pemerintah tersebut dikenal dengan nama e-Government (Akhmad, Mustanir, & Ramadhan, 2006).

Masyarakat yang telah mengetahui dan memahami jika di kelurahan mereka terdapat lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti LPM, PKK, atau BKM sangat menyayangkan lembaga tersebut karena tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan menganggap bahwa lembaga tersebut dibentuk hanya sebagai pelengkap di kelurahan mereka. Masyarakat menginginkan lembaga-lembaga tersebut dapat mengikutsertakan semua masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan di bidang tertentu sesuai dengan minat masing-masing (seperti menjahit, tata boga, tata rias, ataupun di bidang otomotif). Mereka juga menginginkan Lurah bertindak tegas terhadap bawahannya dan selalu memotivasi masyarakat untuk bergerak ke arah perubahan yang lebih baik demi peningkatan ekonomi dan taraf kehidupan yang lebih baik (Ahmad Mustanir 1) & Samad 2), Abdul Jabbar 3), Monalisa Ibrahim 4), 2019).

Partisipasi dimaknai yaitu “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dari definisi ini penulis melihat bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat yang rendah di Desa Bulu Wattang dapat mengakibatkan perencanaan pembangunan melalui musrenbang tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Bulu Wattang

Kecamatan Panca Rijang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang ?(P. A. Ahmad Mustanir, 2017).

TINJAUAN PUSTAKA

• Teori Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi masyarakat adalah suatu aktivitas yang mengikutsertakan perasaan dan emosional seseorang dalam proses pembuatan keputusan dan melaksanakan tanggung jawab dalam suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan(Ahmad Mustanir 1) & Samad 2), Abdul Jabbar 3), Monalisa Ibrahim 4), 2019).

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

• Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif merupakan sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

- Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan

untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat.

- Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan social ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan(Ahmad Mustanir¹), Kamaruddin Sellang²), Akhwan Ali³), Madaling⁴) & 1), 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Bulu Wattang di pengaruhi oleh kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kepala Desa telah melaksanakan perannya sebagai pemimpin dengan baik, komunikasi pemerintah Desa dengan masyarakat terjalin dengan baik dan rendahnya pendidikan masyarakat mempengaruhi partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang.

PEMBAHASAN

Partisipasi dimaknai yaitu “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan

yang terjadi. Dari definisi ini penulis melihat bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat yang rendah di Desa Bulu Wattang dapat mengakibatkan perencanaan pembangunan melalui musrenbang tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang ?(P. A. Ahmad Mustanir, 2017).

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah.

Seperti yang dikemukakan oleh Kuncoro (2004;58) sebagai berikut : Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang meliputi pendekatan top down dan Bottom up, diatas kertas nampaknya akan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, kenyataannya banyak daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi lokal, karena sebagian besar proposal yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Akibatnya, proposal akhir yang masuk ke pusat biasanya di dominasi oleh program yang diajukan oleh level pemerintahan yang lebih tinggi khususnya pemerintah provinsi dan pusat. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan di implementasikannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diharapkan semua program pembangunan daerah akan terintegrasi dengan perencanaan program pembangunan nasional(Mustanir & Yasin, 2018).

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, pemimpin mempunyai peran yang sangat penting sekali dalam pembangunan dalam hal ini Kepala Desa beserta aparatnya dan juga BPD, pembangunan yang dilakukan hendaknya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, oleh sebab itu Kepala Desa, beserta jajarannya harus bisa lebih mengetahui keadaan masyarakat dan apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa tersebut, Demikian juga dengan BPD yang menjadi badan perwakilan aspirasi-aspirasi masyarakat Desa.

Oleh sebab itu faktor kepemimpinan sangat dominan sekali mempengaruhi partisipasi masyarakat sehingga mau terlibat dalam perencanaan pembangunan Desa. Berikut pembahasan dari hasil penelitian dilapangan.

- a. Musyawarah dengan masyarakat dalam menetapkan program program pembangunan.
- b. Memperhatikan aspirasi masyarakat Desa dalam merencanakan pembangunan Desa

- c. Usaha yang dilakukan oleh kepala Desa untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perencanaan pembangunan Desa
- d. Kebebasan masyarakat untuk mengemukakan aspirasi atau pikiran mengenai pembangunan Desa yang akan dilaksanakan

KESIMPULAN

Partisipasi dimaknai yaitu “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan” Dari pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya¹⁵. Musrenbang merupakan forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam seluruh proses pembangunan itu sendiri. Model ini dilandasi pada nilai-nilai dan gotong royong yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat. Gotong royong berlandaskan pada keyakinan bahwa setiap warga mempunyai hak dalam memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungannya serta upaya terbaik mewujudkannya.

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustanir 1), Z., & Samad 2), Abdul Jabbar 3), Monalisa Ibrahim 4), J. 5. (2019). KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LAUTANG BENTENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Journal of Social Politics and Governance*, 1(2), 20–39.
- Ahmad Mustanir, D. (2016). Implementasi kebijakan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa teteaji kecamatan tellu limpoe kabupaten sidenreng rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 04(2), 226–238.
- Ahmad Mustanir, P. A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 248–261.
- Ahmad Mustanir1), Kamaruddin Sellang2), Akhwan Ali3), Madaling4), M., & 1). (2018). PERANAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TONRONGNGE KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Jurnal Ilmiah Clean Government*, 2(1), 67–84.
- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2006). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN ENREKANG. *Prosiding Konferensi Nasional*, 23 – 25(Maret 2018), 89–103.
- Mustanir, A. (2016). Implementasi kebijakan dan efektivitas pengelolaan terhadap penerimaan retribusi di pasar lancirang kecamatan pitu riawa kabupaten sidenreng rappang. *Jurnal Ilmiah*, 13(3), 542–558.
- Mustanir, A. (2018). DEMOCRATIC MODEL ON DECISION-MAKING AT DELIBERATIONS OF DEVELOPMENT PLANNING Nur Justira Kamarudin Selang Andi Ilham Muchtar. *Proceeding International Conference on Government Leadership and Social Science Sam Ratulangi University*, 11–13(April), 99–103.
- Mustanir, A., & Lubis, S. (2017). Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 163(Icodag), 316–319.
- Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2017). Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan. *Prosiding Konferensi Nasional*, 6(September), 1–7.
- Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 21–31.